BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, struktur organisasi, dan mekanisme layanan, seperti pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum memenuhi seluruh prinsip Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang yaitu kendala internal yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan informasi tentang pengaduan, dan ketidaksesuaian data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, kendala eksternal mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Padang dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Padang telah dilakukan

dengan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan layanan informasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas informasi publik.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang, sebagai berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tinggi Padang perlu menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi melalui pelatihan intensif, khususnya bagi petugas PPID, untuk memastikan kelancaran pelayanan informasi publik. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas juga perlu untuk terus ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan bahasa isyarat dan pelayanan khusus untuk disabilitas agar terwujudnya keterbukaan informasi publik di seluruh masyarakat.

2. Optimalisasi Teknologi Informasi

Pengadilan Tinggi Padang disarankan mengembangkan sistem layanan informasi berbasis aplikasi digital yang responsif dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mempercepat penyampaian informasi.

3. Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat

Edukasi lebih intensif mengenai hak-hak atas informasi publik perlu dilakukan melalui media sosial, kampanye publik, dan kerja sama dengan

media lokal agar masyarakat lebih memahami prosedur dan jenis informasi yang dapat diakses.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi efektif guna meningkatkan kualitas layanan.

5. Penyediaan Anggaran Khusus

Pengalokasian anggaran khusus untuk mendukung layanan keterbukaan informasi perlu diprioritaskan untuk menjamin tersedianya infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk menjamin Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tinggi Padang.